

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Femisida adalah bentuk tindakan kekerasan yang berujung pada pembunuhan dengan alasan gender dan dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Istilah femisida pertama dikemukakan oleh Diana Russel bersama Jill Radford pada tahun 1992 yang mendefinisikan sebagai kejahatan yang di dasari oleh rasa benci kepada para wanita (misogyny), rasa kepemilikan, kesenangan, atau penghinaan dimana laki-laki melakukan kekerasan bahkan pembunuhan kepada para perempuan. Femisida sendiri merupakan bentuk perwujudan ekstrim dari budaya patriarki.¹ Femisida tergolong dalam kekerasan terhadap perempuan dan lebih dikenal dengan *violence against women* sehingga dalam traktat CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) femisida merupakan bentuk tindakan aniaya terhadap para perempuan yang bersifat memaksa serta tidak mendapat izin dari korban yang berupa paksaan, ancaman, intimidasi psikologis serta pemerkosaan.²

Tahun 1990-an femisida pertama kali dianggap sebagai masalah yang mengganggu sistematika pemerintahan dan dikecam oleh para aktivis perempuan

¹ Y. A. Wahyuddin & Ambika Putri Swakartika Sari, *Budaya Machismo dan Kekerasan Gender (Femicide) di El Salvador*, IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies Vol. 2 No. 2 hal. 51-53,

² Nuraida Jamil, 'Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi CEDAW', *Muwazah Journal*, Vol. 6 (2014), hal. 167-168

terkait hak asasi manusia. Tidak diberikannya hukuman kepada para pelaku kejahatan femisida menjadikan hal ini terus berulang dan semakin meningkat³. Pada tahun tersebut jumlah wanita yang menjadi korban sebanyak 45.500 kasus. Dan sejak tahun 2016 Kantor Kejaksaan Umum (PPO) menerima 200.000 kasus pembunuhan setiap harinya akibat perang melawan para kartel narkoba, banyaknya kasus yang tercatat menjadikan kasus ini sangat mudah dilupakan oleh Kantor Kejaksaan Umum. Diperkirakan dalam 95% kasus femisida yang terjadi hanya sekitar 27% saja kasus yang kemudian diselidiki dan kasus selebihnya tidak pernah diberi hukuman.

Kota Ciudad Juarez yang dijuluki sebagai kota paling berbahaya di dunia karena banyaknya kasus femisida yang terjadi kota ini. Kota ini berada di perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Masyarakat negara bagian yang bermigrasi ke Amerika harus melewati kota ini. Banyaknya kartel narkoba yang berada di perbatasan mengakibatkan lapangan pekerjaan disana sedikit sehingga banyak perempuan yang terpaksa bekerja kepada kartel untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Dalam data dari *National Citizen Femicide Observatory* di Ciudad Juarez tercatat sebanyak 6 perempuan yang terbunuh setiap harinya, dan sejak tahun 2010 sebanyak 913 laporan terkait perempuan yang sengaja dibunuh, hal ini menyebabkan tingkat femisida di tahun 2017 naik hingga 34% dibanding tahun sebelumnya.⁴

³ Verónica Michel, 'Judicial Reform and Legal Opportunity Structure: The Emergence of Strategic Litigation Against Femicide in Mexico', *Studies in Law Politics and Society*, 82 (2020), hal.32–33.

⁴ Maria Encarnacion Lopez, "Femicide in Ciudad Juárez Is Enabled by the Regulation of Gender, Justice, and Production In Mexico," *online resources website* (2018): 2–5, [http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/88766.\(04-04-2023, 18.52 WIB\)](http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/88766.(04-04-2023, 18.52 WIB))

Tingginya kasus femisida dan pelanggaran HAM di Meksiko dipengaruhi oleh banyaknya kartel narkoba yang melakukan perdagangan dan bersaing untuk mengambil alih distribusi narkoba di seluruh wilayah Meksiko yang menyebabkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan seperti, pemerkosaan, penculikan, serta pembunuhan.⁵ Kartel Juarez merupakan salah satu penyebab banyaknya korban perempuan akibat konflik antar kartel. Banyaknya kasus femisida akibat kartel narkoba berdampak pada terciptanya lingkungan yang sangat berbahaya bagi perempuan. Kartel narkoba beraksi dan lekat dengan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada siapa pun termasuk kepada kartel lawan sebagai bentuk ancaman. Kartel narkoba juga melakukan eksploitasi seksual seperti penculikan paksa untuk menjadi pekerja prostitusi, dan mengisi kekosongan anggota untuk menjadi kurir narkoba. perdagangan perempuan⁶.

Pengaruh lain dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Meksiko adalah adanya budaya machismo yang melekat pada masyarakat khususnya laki-laki Meksiko. Machismo sendiri merupakan konsep sosial dan budaya yang menekankan dominasi laki-laki terhadap perempuan dengan mengadopsi nilai patriarki ekstrem. Laki-laki dituntut untuk menunjukkan kekuatan dan menjadi pemimpin dalam keluarga dan masyarakat dengan keberanian dan ketangguhan. Sementara perempuan dianggap lemah dan harus mematuhi laki-laki dengan menjalankan peran tradisional seperti merawat rumah dan anak-anak. Budaya machismo menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan

⁵ Faisyal Rani & Efragil Samosir, 'Efektivitas Kerjasama Penanggulangan Peredaran Narkoba Ilegal', *Journal FISIP*, Vol.1 No. 2 (2012), hal 1–4.

⁶ Jennie B. Gamlin and Sarah J. Hawkes, "Masculinities on the Continuum of Structural Violence: The Case of Mexico's Homicide Epidemic," *Social Politics* 25, no. 1 (2018): 50–71.

mendorong ide bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah hal yang dapat diterima dan dianggap normal. Intimidasi dan dominasi kuat yang dilakukan laki-laki kepada perempuan sebagai upaya untuk mempertahankan dominasi laki-laki. Budaya machismo akhirnya menjadi penghalang untuk terciptanya kesetaraan gender di Meksiko.⁷

Budaya machismo dan budaya patriarki adalah dua konsep yang sering saling terkait, namun memiliki perbedaan dalam cakupan dan fokus. Machismo secara khusus menekankan nilai-nilai maskulinitas yang ekstrem, seperti keberanian, kekuatan fisik, dominasi, dan protektivitas.⁸ Ini melibatkan serangkaian norma dan perilaku yang menonjolkan maskulinitas tradisional sedangkan Patriarki merujuk pada sistem sosial dan politik di mana laki-laki memegang kekuasaan utama dan dominasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial.⁹ Dalam perilaku sosial Machismo sering diekspresikan dalam perilaku pribadi dan interaksi sosial sehari-hari, seperti cara pria berinteraksi dengan perempuan, pengambilan keputusan dalam keluarga, dan sikap terhadap kekuatan fisik dan emosional. Hal ini berbeda dengan patriarki yang memberikan keuntungan dan kekuasaan kepada laki-laki, dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Ini termasuk undang-undang, kebijakan, dan norma sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender.

⁷ Luis A. Valdez, Emily C. Jaeger, David O. Garcia, Derek M. Griffith, *Breaking Down Machismo: Shifting Definitions and Embodiments of Latino Manhood in Middle Aged Latino Men*, American Journal of Mens's Health, 2023, hal.2-3

⁸ Mirandé, A. (2018). *Hombres y machos: Masculinity and Latino culture*. Routledge.

⁹ Edström, J., Das, A., & Dolan, C. (2014). Introduction: Undressing Patriarchy and Masculinities to Re-politicise Gender. *IDS Bulletin*, 45(1), 1-10.

Maraknya kasus femisida yang terjadi di Meksiko tentunya memberikan dampak buruk bagi banyak aspek kehidupan, seperti tingkat keselamatan perempuan, pendidikan, serta politik. Dalam aspek keselamatan perempuan dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia karena dalam kasus femisida hak perempuan untuk hidup dan kebebasannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya ketakutan untuk menjadi korban kekerasan pemerkosaan, penculikan bahkan pembunuhan telah direnggut, tindakan kriminal ini juga masuk dalam diskriminasi bagi perempuan akibat terjadinya ketidakadilan. Akibatnya banyak dari perempuan Meksiko yang mengalami trauma mendalam akibat kekerasan yang marak terjadi dan harus hidup dalam bayang-bayang rasa takut yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental atau depresi akibat beban psikologis yang sangat berat¹⁰.

Lalu pada aspek pendidikan dari maraknya kasus kekerasan yang terjadi mengakibatkan perempuan sangat kesulitan untuk mengakses pendidikan, sebab kecemasan para orang tua yang melarang anak perempuannya untuk bersekolah. Dalam aspek politik peran perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan, organisasi maupun politik kerap kali mendapatkan diskriminasi. Diskriminasi ini kemudian memberikan pengaruh untuk menyatakan pendapat serta proses pengambilan keputusan, oleh karena itu rendahnya tingkat partisipasi politik di Meksiko memberikan citra buruk bagi masyarakat internasional karena dianggap sebagai negara dengan ketidaksetaraan gender yang tinggi karena tidak mampu

¹⁰ Teddy Farhan, *“Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan Terhadap Kasus Femisida Di Meksiko Tahun 2019-2021,” skripsi.* (2022)

untuk memperdayakan serta memberikan rasa aman kepada warganya khususnya perempuan¹¹.

Melihat hal ini pemerintah Meksiko sebelumnya telah banyak mengeluarkan peraturan serta kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Contohnya pada masa kepemimpinan Presiden Enrique Pena Nieto kembali menerapkan kebijakan *War On Drugs* merupakan kebijakan lanjutan dari presiden Felipe Calderon Hinojosa. Kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2006 bulan Desember untuk memerangi para kartel narkoba, atau secara lokal disebut *guerra contra el narcotráfico*¹² dimana sistem kebijakan pemerintah melakukan intervensi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun kebijakan ini nyatanya tidak berhasil untuk menurunkan kasus femisida yang terjadi melainkan menambah jumlah kasus femisida karena kebijakan ini bertujuan untuk memberantas kartel narkoba sehingga para kartel melakukan tindakan balas dendam dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan. Selain itu pada tahun, 2007 dikeluarkannya ***Undang-Undang La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*** yang membahas semua tindakan kekerasan kepada perempuan serta menjadi patokan pemerintah untuk menghindari munculnya tindakan femisida dengan melakukan kampanye sosialisasi gender untuk mengedukasi para warga agar tidak merampas harga diri dan kehormatan para perempuan.¹³

¹¹ Brian Ridho Zulfikar, “Tinjauan Aspek-Aspek Feminisme Dalam Penanggulangan Femisida Di Meksiko Pada Kepemimpinan Enrique Pena Nieto 2012-2018,” skripsi (2022),

¹² Commission Mexicana de Defense Y, ‘Human Rights And The War On Drugs In Mexico’, 1, 2015, 1–27. (12/04/2023. 20.30 WIB)

¹³ Rohiman Mukti Mubarak, Linda Dwi Eriyanti, and Muhammad Iqbal, “Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide (The Failure Of Mexico Government Policy To Overcome Femicide Crisis) Journal of Feminism and Gender Studies 1, no. 1 (2021): 12–21,

Penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan kasus femisida di Meksiko setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun pemerintah telah banyak melakukan upaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mengatasi kasus tersebut. Sehingga perlu diteliti bagaimana upaya yang dilakukan presiden selanjutnya yaitu Andres Manuel Lopez Obrador untuk mengatasi kasus femisida di Meksiko yang meningkat setiap tahunnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis akan meneliti terkait upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Meksiko dalam menanggulangi femisida yang terjadi. Sehingga, topik yang akan diteliti dalam tulisan ini merupakan *“Bagaimana upaya pemerintah Meksiko dalam menanggulangi kasus femisida pada masa pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador tahun 2018-2023?”*.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari topik permasalahan di atas, riset ini bertujuan sebagai untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Meksiko di bawah kepemimpinan Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dalam menanggulangi kasus femisida selama masa kepemimpinannya

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung beberapa manfaat yaitu manfaat di bidang akademis dan manfaat praktis, diantaranya :

a. Manfaat Akademis

Untuk manfaat akademis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan membantu menambah wawasan literatur masyarakat mengenai Kekerasan Berbasis Gender, serta membantu dalam bidang keilmuan serta sumber referensi maupun sumber riset. Penelitian ini juga diharapkan membantu dalam penelitian selanjutnya serta memberikan informasi relevan di Hubungan Internasional dalam menyikapi Kekerasan Berbasis Gender berupa Femisida yang menjadi kasus di berbagai negara.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bantuan berupa topik pembahasan terkait Upaya Meksiko dalam menanggulangi kasus kekerasan dan femisida yang marak terjadi serta membantu untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mengambil rujukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang penulis bahas. Tujuan dari penelitian terdahulu untuk mencegah terjadinya kesamaan fokus penelitian dengan para peneliti sebelumnya, sehingga dalam penelitian ini akan memiliki kebaruan sebagai tulisan ilmiah.

Penelitian pertama skripsi oleh Teddy Farhan¹⁴ dalam skripsi ini berjudul **Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan terhadap Kasus Femisida di Meksiko Tahun 2019-2021**, Pada skripsi milik Teddy Farhan memaparkan bahwa kasus femisida banyak terjadi di Meksiko dikarenakan oleh beberapa faktor, jika dilihat dalam konsep segitiga kekerasan milik Johan Galtung faktor ini dibagi menjadi tiga, yaitu kekerasan kultural, struktural dan langsung. Faktor yang melingkupi kekerasan kultural adalah bahasa, ideologi, seni, hingga agama, kekerasan struktural menurut Galtung merupakan kekerasan yang dimaklumi dan dianggap biasa oleh lingkup sosial dan pelaku dari kekerasan struktural merusak kebutuhan dasar masyarakat contohnya lingkungan Meksiko yang didominasi oleh para kartel narkoba secara tidak langsung membentuk lingkungan yang meminggirkan para perempuan yang menimbulkan banyaknya kekerasan hingga pembunuhan, lalu pada kekerasan langsung biasanya terjadi karena kekerasan yang dialami pada rumah tangga. Namun dalam skripsi milik Teddy Farhan tidak menjelaskan terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko dalam mengatasi kasus femisida yang terjadi di negaranya pada saat itu. Dalam tulisan ini hanya berfokus pada penjelasan kasus mulai dari penyebab terjadinya jika dilihat dari aspek sosial masyarakat.

Penelitian kedua, jurnal oleh Sonia M. Frias¹⁵ dalam jurnal ilmiah berjudul **Femicide and Feminicide in Mexico: Patterns and Trends in Indigenous and Non-Indigenous Regions**, Dalam jurnal ilmiah milik Sonia M. Frias memaparkan

¹⁴ Teddy Farhan, “*Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan Terhadap Kasus Femisida Di Meksiko Tahun 2019-2021*,” skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia

¹⁵ Sonia M. Frías, “*Femicide and Feminicide in Mexico: Patterns and Trends in Indigenous and Non-Indigenous Regions*,” Vol 18, no. 1 (2023), Mexico: Feminist Criminology 3–23

bahwa kasus pembunuhan yang terjadi di Meksiko meningkat sejak tahun 2017, namun peningkatan yang signifikan hanya terjadi pada pembunuhan kepada para perempuan (femicides) hal ini berbeda dengan pembunuhan yang terjadi pada laki-laki (male homicide). Dimana tingkat pembunuhan kepada laki-laki cenderung stabil daripada pembunuhan perempuan. Terlebih lagi angka pembunuhan perempuan pribumi atau perempuan di kota adat lebih tinggi dibandingkan non-pribumi hal ini selalu terjadi sejak tahun 2001. Oleh karena itu argument ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah Meksiko tidak bisa mengatasi kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan yang kian meningkat di negaranya sejak tahun 2010 hingga 2017. Selain itu pemerintah juga perlu untuk merancang kebijakan publik secara lebih mendetail terkait kasus yang terjadi di kota adat dengan segala kekhasannya di setiap budaya yang bertujuan untuk menghilangkan pandangan stereotip masyarakat. Namun dalam jurnal milik Sonia M.Frias ini tidak mencantumkan terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Meksiko dalam upaya untuk menekan kasus pembunuhan perempuan pribumi dan non pribumi yang berada di kota madya khususnya pada perempuan yang berada dalam lingkup kota adat.

Penelitian ketiga skripsi oleh Brian Ridho zulfikar¹⁶ dalam skripsi berjudul **Tinjauan Aspek-Aspek Feminisme Dalam Penanggulangan Femisida Di Meksiko Pada Kepemimpinan Enrique Pena Nieto 2012-2018**. Dalam skripsi ini Brian Ridho zulfikar memaparkan bahwa Meksiko dibawah kepemimpinan Enrique Pena Nieto telah memberikan perubahan dalam kebijakannya untuk

¹⁶ Brian Ridho Zulfikar, “*Tinjauan Aspek-Aspek Feminisme Dalam Penanggulangan Femisida Di Meksiko Pada Kepemimpinan Enrique Pena Nieto 2012-2018*,” skripsi Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia (2022)

mengatasi kasus femisida yang marak terjadi. Perubahan kebijakan ini dilakukan dengan memberikan perspektif gender yang merupakan fenomena baru dalam pemerintahan Meksiko. Dalam kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi diskriminasi yang terjadi pada perempuan di Meksiko dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu presiden Enrique Pena Nieto juga menjalankan kebijakan dari presiden sebelumnya yaitu War On Drugs untuk memerangi kartel narkoba yang tersebar di wilayah Meksiko. Namun dalam realitanya upaya yang dilakukan oleh Enrique Pena Nieto tidak berhasil untuk menekan angka femisida yang terjadi karena kebijakan tersebut menimbulkan konflik nyata antara pemerintah dan para geng kriminal yang menimbulkan banyak korban mulai dari perempuan, anak dan remaja perempuan serta aparat kepolisian, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk kesekian kali pemerintahan Meksiko gagal untuk menjadikan negaranya aman bagi kaum perempuan. Namun kekurangan dari skripsi ini adalah pada saat pemerintahan Enrique Pena Nieto yang berspektif gender, penulis tidak menjelaskan terkait upaya penambahan kuota perempuan dalam bidang pemerintahan pada masa presiden tersebut.

Penelitian keempat jurnal ilmiah milik Geofredo Angulo Lopez¹⁷ dalam jurnal ilmiah yang berjudul **Femicide and Gender Violence in Mexico: Elements for a Systemic Approach**. Jurnal ilmiah ini memaparkan bahwa femisida merupakan sebuah metode penyiksaan yang dilakukan para pria terhadap perempuan . Dimana kekerasan terhadap wanita merupakan sebuah fenomena yang sangat kompleks. Contohnya pada kekerasan yang terjadi dalam rumah

¹⁷ Geofredo Angulo Lopez, "Femicide and Gender Violence in Mexico: Elements for a Systemic Approach," *Age of Human Rights Journal* 12, no. 12 (2019): 158–183

tangga, masyarakat Meksiko banyak menganggap bahwa hal tersebut merupakan ranah pribadi dan perempuan menjadi korban tidak mau untuk melaporkan hal tersebut dan cenderung membiarkan hal tersebut. Selain itu rendahnya penyelidikan untuk mengusut kasus kekerasan ini menjadikan para pelaku tidak mendapatkan hukumannya. Menurut Gunther Jakobs hukuman sendiri berfungsi untuk memberikan efek jera agar tindakan tersebut tidak akan terulang lagi. Akibat dari masalah ini menimbulkan banyaknya kasus-kasus kekerasan yang kian terjadi dan akan terus ada. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan kontrol yang tegas untuk memberikan sanksi pidana agar kesetaraan dan hak asasi manusia di Meksiko dapat tercapai. Namun jurnal milik Geofredo Angulo Lopez tidak memaparkan terkait upaya yang dilakukan pemerintah Meksiko untuk mengatasi kasus femisida yang terjadi yaitu pada kebijakan public pemerintah saat itu.

Penelitian kelima jurnal ilmiah milik Rohiman Mukti Mubarak, Linda Dwi Eriyanti dan Muhammad Iqbal¹⁸ jurnal ini berjudul **Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide (The Failure Of Mexice Government Policy To Overcome Femicide Crisis)**. Dalam jurnal ini memaparkan bahwa budaya machismo dalam perkembangannya sangat dipertahankan oleh masyarakat yang menjadikan kasus kekerasan dipandang sebagai hal yang wajar. Hal ini dipengaruhi karena pemerintah tidak menjadikan kasus kekerasan menjadi prioritas utama yang harus di selesaikan, sehingga para pihak berwajib cenderung abai untuk menindak tegas menjadikan kasus kekerasan

¹⁸ Mubarak, Eriyanti, and Iqbal, "Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide (The Failure Of Mexice Government Policy To Overcome Femicide Crisis) Rohiman Mukti Mubarak , Linda Dwi."

semakin meningkat. Selain itu gagalnya kebijakan femisida juga disebabkan oleh bisnis kartel narkoba yang banyak bermunculan dan mendominasi wilayah Meksiko. Organisasi ini kemudian mendorong banyak lembaga untuk melakukan kasus suap untuk membiarkan tindakan yang kelompok ini lakukan. Para kelompok ini banyak melakukan tindakan kriminal seperti penculikan dan pemerkosaan serta perang melawan kartel lain yang bertujuan untuk memperluas wilayah, dimana dalam konteks perang ini perempuan banyak dibunuh sebagai objek untuk melemahkan kekuatan serta memberikan ancaman bagi kartel lawan. Selain itu para korban femisida tidak mendapatkan akses hukum yang memadai. Namun dalam jurnal ini tidak memaparkan secara spesifik kebijakan apa yang diterapkan pada masa pemerintahan dan bentuk kebijakan seperti apa yang di implementasikan di Meksiko pada saat itu.

Penelitian ke enam merupakan jurnal penelitian milik Alejandra Vela yang berjudul “**The Crisis Of Femicide in Mexico 2022¹⁹**”. Dalam jurnal ini membahas terkait faktor terjadinya kasus femisida di dasari oleh beberapa faktor seperti organisasi narkoba atau biasa dikenal dengan kartel, impunitas keadilan, korupsi yang merajela, kekerasan dalam rumah tangga atau femisida pasangan intim dimana pelakunya bisa suami, pasangan atau ayah dari seorang anak perempuan, lalu kemiskinan. Dengan faktor utama dari banyaknya kasus femisida yaitu kartel yang mendominasi negara Meksiko dimana organisasi ini identik akan perang teritorial dan juga tindakan kriminal lainnya. Para kartel ini bertujuan untuk memperebutkan wilayah teritorial untuk menguasai negara yang kaya akan

¹⁹ Alejandra Vela, *The Crisis of Femicide In Mexico 2022* , Journal of Justice Studies and Forensic Science, vol.11, no. 2 (California : San Jose State University 2023) hal 3-8

sumber daya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan illegal seperti narkoba dan manusia. Kartel yang terkenal di wilayah Meksiko adalah Kartel de Sinaloa, Kartel Jalisco Nueva Generacion, Kartel De Juarez, Los Zetas dan banyak lainnya. Selain itu kemiskinan dikarenakan sumberdaya rendah sebab kurangnya pelatihan dan program bagi masyarakat. Sebab jurnal ini banyak membahas terkait bagaimana kasus femisida mampu diidentifikasi dari korban tewas, dapat dilihat dengan berkas gigitan dan juga air liur yang tertinggal pada korban dengan menggunakan ilmu metode forensik odontologi. Ilmu odontology ini merupakan otopsi pada gigi korban yang bertujuan untuk kepentingan keadilan. Namun dalam jurnal ini mengatakan bahwa tindakan otopsi dengan odontology juga cukup sulit untuk digunakan dalam mencari tersangka.

Lalu penelitian ketujuh adalah Tesis milik Leticia Zimmer Olegario yang berjudul **“Violence Against Women : An Analysis of Femicide in Brazil²⁰”**. Dalam thesis ini menjelaskan bahwa kasus femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Faktor utama karena kentalnya budaya Machismo (kejantanan) di lingkup masyarakat Brazil berdampak pada ketidakamanannya kehidupan perempuan di negara tersebut. Budaya Brazil sendiri sangat membahayakan perempuan dalam segala hal identitas. Banyak norma sosial yang bersifat seksis, identitas kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan dengan warna kulit yang berbeda, transgender dan transeksual. Walaupun Brazil sendiri memiliki Undang-Undang khusus untuk

²⁰ Leticia Zimmer Olegario, *Violence Against Women : An Analysis of Femicide in Brazil* Thesis, Norway : Master’s Peace and Conflict Transformation 2019, hal. 44

mengatur masalah kekerasan terhadap perempuan, contohnya Hukum Maria de Penha dan Undang-Undang Femicide namun pada realita nya hal tersebut tidak seefektif yang diharapkan. Norma sosial yang berkembang di Brazil yaitu Machismo atau kejantanan mengarah pada laki-laki yang bersifat agresif dan memaksa perempuan untuk patuh dibawah kuasa laki-laki. Untuk itu untuk mengakhiri hal tersebut dapat dilakukan perubahan konstruksi sosial gender dengan memberikan pelatihan khusus pada pegawai negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menanggulangi kasus femisida di Brazil maka perlu untuk memasukkan perspektif gender ke dalam Undang-Undang sebagai dasar pengadilan.

Penelitian ke delapan milik Mariamne Crippa Mendez dan Adriana Rodriguez Barraza yang berjudul **“An Interpretation of Femicide in Mexico: Violence and Human Rights”**²¹. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pemerintah Meksiko lebih banyak menerapkan kebijakan pencegahan yang ditujukan kepada calon korban contohnya dengan adanya peraturan tersirat tentang jam malam, menghindari suatu tempat dalam waktu tertentu. Dan bukan kebijakan yang bertujuan untuk merubah konstruksi sosial dan budaya untuk menyelesaikan konflik ketimpangan antar gender. Sehingga untuk menanggulangi kasus femisida sangat memerlukan praktik sosial untuk membentuk jaringan sosial dan kesadaran masyarakat. Siklus kekerasan sendiri tidak terjadi secara otomatis, oleh karena itu jika kekerasan dilawan dengan dengan tindakan kekerasan maka hal ini akan menimbulkan kasus kekerasan dan juga korban yang

²¹ Mariamne Crippa Mendez dan Adriana Rodriguez Barraza, *An Interpretation of Femicide in Mexico: Violence and Human Rights*, Scientific research Publishing, vol. 11 no.28, Meksiko 2022 hal. 8

lebih besar. Hal ini juga akan berdampak pada lingkungan yang semakin tidak aman bagi perempuan. Selain itu kelalaian pemerintah Meksiko dalam menjalankan tugasnya untuk menindak lanjuti pengaduan hukum yang diajukan oleh masyarakat menjadikan masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan lembaga hukum yang ada. Dampak dari rasa ketidakpercayaan ini membuat para pelaku terkesan dapat bebas untuk melakukan kekerasan tersebut secara berulang tanpa takut untuk dihukum.

Penelitian kesembilan milik Chloe Rizk yang berjudul **“The Femicide Epidemic: A Case Study Analysis Of Governmental Response and Recommendations for Combatting Femicide in El Salvador²²”**. Dalam thesis ini menjelaskan tentang apakah upaya pemerintah di El Salvador saat ini dapat dikatakan efektif untuk memberantas kasus femisida yang terjadi. El Salvador sendiri telah menetapkan Undang-Undang terkait kekerasan terhadap perempuan, contohnya adalah dengan membentuk unit khusus, layanan telpon pengaduan, penampungan korban femisida. Terbukti bahwa upaya ini berhasil memberikan dampak positif sebab diketahui bahwa kasus femisida di El Salvador telah menurun sejak tahun 2010 hingga 2021. Namun walaupun kebijakan ini sangat berdampak positif namun masih terdapat kekurangan seperti rendahnya sistem hukum yang berdampak pada lumpuhnya sistem peradilan, diketahui masih banyak pelaku tindakan kekerasan terhadap perempuan yang tidak dihukum. Sehingga ketika pemerintah juga meningkatkan sistem peradilannya dengan menambahkan poin tersebut dalam Undang-Undang yang berlaku maka pastinya

²² Chloe Rizk, *The Femicide Epidemic: A Case Study Analysis Of Governmental Response and Recommendations for Combatting Femicide in El Salvador*, Thesis, Mississippi, University of Mississippi, hal.47

akan memberikan hasil yang sangat positif bagi negaranya. Diketahui bahwa El Salvador sendiri telah mengalami tantangan untuk mengumpulkan data yang lebih akurat, sebab masih banyak laporan dari para perempuan yang merasa pengaduan mereka belum ditindak lanjut oleh pemerintah. Sehingga upaya untuk memberantas femisida dapat dilakukan dengan tindakan sederhana seperti memberikan program sosialisasi penyadaran akibat ketidaksetaraan gender kepada masyarakat.

Penelitian kesepuluh merupakan skripsi milik Nur Zahrotul Hayati yang berjudul **“Kegagalan Meksiko Terhadap CEDAW Dalam Penanganan Femicide Pada Pemerintahan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador 2019-2021”²³**. Dalam skripsi ini adanya perubahan pemerintahan menjadikan adanya pergeseran fokus kebijakan dari pemerintahan tersebut, diketahui Meksiko pada saat pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador adanya sikap ketidapatuhan Meksiko terhadap CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). CEDAW sendiri merupakan organisasi internasional yang memperjuangkan kebebasan dan hak asasi para perempuan. Ketidapatuhan Meksiko dalam menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam CEDAW untuk menanggulangi kasus femisida dapat dilihat karena permasalahan manajemen yang didasari oleh beberapa faktor yaitu Ambiguity karena timbulnya perbedaan pemahaman dari femisida itu sendiri, Limitation on Capacity yaitu rendahnya kapabilitas domestik dari Meksiko itu sendiri untuk menyelidiki kasus femisida, lalu The Temporal Dimension adanya peralihan kekuasaan yang

²³ Nur Zahrotul Hayati, *Kegagalan Meksiko Terhadap CEDAW Dalam Penanganan Femicide Pada Pemerintahan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador 2019-2021*, Skripsi, Jogjakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, hal. 51-52

menyebabkan perbedaan fokus kebijakan, dimana setiap pemerintahan tentu memiliki karakteristik dari kebijakannya sendiri.

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

No	Judul dan Nama Penulis	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan terhadap Kasus Femisida di Meksiko Tahun 2019-2021 – Teddy Farhan	Metode penelitian : Kualitatif Model penelitian : Deskriptif	Kasus Femisida pada masa Covid-19 semakin melonjak naik, hal ini dikarenakan pada masa kepemimpinan Andres Manuel Lopez Obrador diberlakukannya kebijakan untuk tetap tinggal dirumah yang berdampak pada kasus kekerasan rumah tangga yang dialami oleh para perempuan semakin tinggi. Terlebih Kebijakan tersebut juga sangat tidak memihak bagi para perempuan di Meksiko.
2.	Femicide and Feminicide in Mexico: Patterns and Trends in Indigenous and Non-Indigenous Regions – Sonia M. Frias	Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif Model Pendekatan :Statistik	Femisida sebagai isu yang sangat kontroversial, terlebih di Meksiko kasus ini dianggap sangat serius sebab kasus femicide sangat tinggi dan berbanding terbalik dengan kasus male homicide. Pada nyatanya hukum sangat sulit untuk dimasukkan dalam realitas sosial oleh karena itu dibutuhkannya kesadaran sosial bagi masyarakat untuk bertanggung jawab pada setiap hak asasi

			manusia.
3.	Tinjauan Aspek-Aspek Feminisme Dalam Penanggulangan Femicida Di Meksiko Pada Kepemimpinan Enrique Pena Nieto 2012-2018 – Brian Ridho Zulfikar	Metode Penelitian : Kualitatif	Enrique Pena Nieto selama masa pemerintahannya sangat serius untuk mengatasi kasus femisida yang terjadi. Contohnya dikeluarkannya kebijakan dengan perspektf gender serta banyak dari kampanye menolak kasus femisida dan di dukung penuh oleh presiden tersebut.
4.	Femicide and Gender Violence in Mexico: Elements for a Systemic Approach - Geofredo Angulo Lopez	Metode Penelitian : Kualitatif	Di tahun 2018 merupakan tahun terkejam dalam sejarah Meksiko. Sebanyak 21.877 kasus pembunuhan terjadi dan masuk dalam kategori pembunuhan dengan kejahatan tinggi. Dimana kasus ini sangat kompleks sehingga perlu ketersediaan negara untuk mengutamakan kebijakan publik untuk mencegah tindakan kriminal kembali terulang.
5.	Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide (The Failure Of Mexice Government Policy To Overcome Femicide Crisis) - Rohiman Mukti Mubarak, Linda Dwi Eriyanti dan	Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif	Kebijakan Pencegahan kasus Femicida di Meksiko dianggap sebagai kebijakan yang gagal sebab tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena tidak mampu untuk menurunkan dan menghilangkan kasus kekerasan terhadap

	Muhammad Iqbal		perempuan
6.	The Crisis Of Femicide in Mexico 2022 - Alejandra Vela	Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif	Faktor terjadinya kasus femisida di dasari oleh beberapa faktor seperti organisasi narkoba atau biasa dikenal dengan kartel, impunitas keadilan, korupsi yang merajela, kekerasan dalam rumah tangga atau femisida pasangan intim dimana pelakunya bisa suami, pasangan atau ayah dari seorang anak perempuan, lalu kemiskinan. Dengan faktor utama dari banyaknya kasus femisida yaitu kartel yang mendominasi negara Meksiko dimana organisasi ini identik akan perang teritorial dan juga tindakan kriminal lainnya.
7.	Violence Against Women : An Analysis of Femicide in Brazil - Leticia Zimmer Olegario	Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif	Faktor utama karena kentalnya budaya Machismo (kejantanan) di lingkup masyarakat Brazil berdampak pada ketidakamanannya kehidupan perempuan di negara tersebut. Budaya Brazil sendiri sangat membahayakan perempuan dalam segala hal identitas. Banyak norma sosial yang bersifat seksis, identitas kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan dengan warna kulit yang berbeda, transgender dan transeksual.
8.	An Interpretation of Femicide in Mexico: Violence and Human Rights - Mariamne Crippa Mendez dan	Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif	Pemerintah Meksiko lebih banyak menerapkan kebijakan pencegahan yang ditujukan kepada calon korban contohnya dengan

	Adriana Rodriguez Barraza		adanya peraturan tersirat tentang jam malam, menghindari suatu tempat dalam waktu tertentu. Dan bukan kebijakan yang bertujuan untuk merubah konstruksi sosial dan budaya untuk menyelesaikan konflik ketimpangan antar gender.
9.	The Femicide Epidemic: A Case Study Analysis Of Governmental Response and Recommendations for Combatting Femicide in El Salvador - Chloe Rizk	Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif	Upaya pemerintah di El Salvador saat ini dapat dikatakan efektif untuk memberantas kasus femisida yang terjadi. El Salvador sendiri telah menetapkan Undang-Undang terkait kekerasan terhadap perempuan, contohnya adalah dengan membentuk unit khusus, layanan telpon pengaduan, penampungan korban femisida. Terbukti bahwa upaya ini berhasil memberikan dampak positif sebab diketahui bahwa kasus femisida di El Salvador telah menurun sejak tahun 2010 hingga 2021.
10.	Kegagalan Meksiko Terhadap CEDAW Dalam Penanganan Femicide Pada Pemerintahan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador 2019-2021- Nur Zahrotul Hayati	Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif	Perubahan pemerintahan menjadikan adanya pergeseran fokus kebijakan dari pemerintahan tersebut, diketahui Meksiko pada saat pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador adanya sikap ketidakpatuhan Meksiko terhadap CEDAW (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>). Ketidakpatuhan Meksiko dalam menjalankan nilai-nilai yang

			terkandung dalam CEDAW untuk menanggulangi kasus femisida dapat dilihat karena permasalahan manajemen yang didasari oleh beberapa faktor yaitu Ambiguity, Limitation of Capacity dan The Temporal Dimension.
--	--	--	--

Kesimpulan dari literature review ini adalah pada penelitian milik Teddy Farhan²⁴, Sonia M. Frias²⁵, Alejandra Vela dan Geofredo²⁶ Angulo Lopez²⁷ membahas terkait kekompleksitas fenomena femisida yang terjadi di Meksiko di dasari oleh dominasi organisasi narkoba yang menyebabkan impunitas keadilan dan korupsi yang semakin merajelala di berbagai lembaga pemerintah, dimana pembunuhan terhadap perempuan (femicide) cenderung terjadi lebih tinggi dibanding pembunuhan terhadap laki-laki (male homicide) sehingga untuk menghapus kejahatan tersebut dibutuhkan banyak cara yaitu selain melalui penguatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah perlu adanya kesadaran yang terjadi bagi seluruh lingkup masyarakat untuk menyetarakan hak serta martabat antara perempuan dan laki-laki.

²⁴ Teddy Farhan, “Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan Terhadap Kasus Femisida Di Meksiko Tahun 2019-2021.”, Skripsi, Jogjakarta,: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia

²⁵ Frias, “*Femicide and Feminicide in Mexico: Patterns and Trends in Indigenous and Non-Indigenous Regions*” *Feminist Criminology* Vol. 18(1) No. 3-23 (2021) , Mexico : Avenida Universidad

²⁶ Alejandra Vela, *The Crisis of Femicide In Mexico 2022* , *Journal of Justice Studies and Forensic Science*, vol.11, no. 2 (California : San Jose State University 2023) hal 3-8

²⁷ Lopez, “*Femicide and Gender Violence in Mexico: Elements for a Systemic Approach*”, *The Age of Human Rights Journal*, vol.12 (2019)

Dalam penelitian milik Rohiman Mukti Mubarok, Linda Dwi Eriyanti dan Muhammad Iqbal²⁸ membahas terkait kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan yang sukses atau tidak dilihat dari beberapa faktor contohnya seperti gagal untuk mencapai tujuan utama, dampak dari kebijakan menimbulkan berbagai konflik yang membuat keadaan semakin memburuk, dan tingkat inovasi yang rendah serta respon yang lambat dari pemerintah. Dari faktor ini kebijakan untuk melakukan pencegahan pada kasus femisida dianggap sebagai kebijakan yang gagal karena para pihak berwajib dianggap lalai dalam menindak tegas kasus kekerasan ini yang mengakibatkan kasus femisida tidak berhasil diatasi. Sedangkan penelitian milik Mariamne Crippa²⁹ dan Adriana Rodriguez menjelaskan bahwa pemerintah Meksiko cenderung dalam membuat kebijakan berfokus pada tindakan pencegahan bagi para korban dan bukan mengutamakan perubahan konstruksi sosial. Hal ini hampir mirip dengan penelitian milik Chloe Rizk³⁰ dimana di El Salvador juga pemerintahnya menerapkan kebijakan pencegahan bagi para korban seperti menyediakan layanan telepon pengaduan bagi para korban, namun kebijakan ini berdampak positif untuk menurunkan angka femisida di negara tersebut.

²⁸ Mubarok, Eriyanti, and Iqbal, "Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide (The Failure Of Mexico Government Policy To Overcome Femicide Crisis) Rohiman Mukti Mubarok , Linda Dwi.", *Journal of Feminism and Gender Studies*, Vol.1 No.1 (2022)

²⁹ Mariamne Crippa Mendez dan Adriana Rodriguez Barraza, *An Interpretation of Femicide in Mexico: Violence and Human Rights*, Scientific research Publishing, vol. 11 no.28, Meksiko 2022 hal. 30

³⁰ Chloe Rizk, *The Femicide Epidemic: A Case Study Analysis Of Governmental Response and Recommendations for Combatting Femicide in El Salvador*, Thesis, Mississippi, University of Mississippi, hal.47

Kemudian dalam penelitian milik Brian Ridho Zulfikar³¹ membahas terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Enrique Pena Nieto dalam upaya untuk memberantas kasus femisida yang terjadi dengan memasukan unsur gender kedalam kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi diskriminasi yang terjadi pada perempuan di Meksiko dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, dan politik seperti penguatan lembaga Unit Kesetaraan Gender (UIG) untuk mempromosikan kebijakan nasional kesetaraan antara perempuan dan laki-laki serta memberikan dukungan penuh terhadap gerakan masyarakat untuk memperjuangkan hak perempuan. Sedangkan penelitian milik Penelitian milik Nur Zahrotul Hayati³² membahas terkait Meksiko dianggap tidak patuh sebab tidak mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam CEDAW untuk melindungi hak asasi perempuan di Meksiko, hal ini dikarenakan adanya pergantian kepemimpinan dari Enrique Pena Nieto yang arah kebijakannya fokus untuk menambahkan kuota perempuan dalam pemerintahan sedangkan Andres Manuel Lopez Obrador fokus kebijakan untuk meminimalisir penyebaran akar korupsi yang terjadi di lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Dari beberapa penelitian yang penulis gunakan sebagai literature review, penulis meninjau kasus femisida pada masa pemerintahan Andres Manuel Lopez terkait upaya dan tindakan apa saja yang dilakukan oleh presiden tersebut sebagai bentuk respon untuk menurunkan kasus femisida yang kian marak terjadi

³¹ Brian Ridho Zulfikar, *“Tinjauan Aspek-Aspek Feminisme Dalam Penanggulangan Femisida Di Meksiko Pada Kepemimpinan Enrique Pena Nieto 2012-2018.”*, Skripsi, Jogjakarta : Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia

³² Nur Zahrotul Hayati, *Kegagalan Meksiko Terhadap CEDAW Dalam Penanganan Femicide Pada Pemerintahan Persiden Andres Manuel Lopez Obrador 2019-2021*, Skripsi, Jogjakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universita Islam Indonesia, hal. 51-52

sehingga penulis melihat dalam kebijakan serta tindakan yang dilakukan oleh Andres Manuel Lopez Obrador sebagai respon terkait isu diskriminasi terhadap perempuan Meksiko.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini akan membahas terkait upaya yang yang dikeluarkan oleh pemerintah Meksiko pada masa pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO). Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Kebijakan Publik untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador telah mampu menurunkan kasus femisida yang terjadi di Meksiko.

1.5.1 Konsep Kebijakan Publik

Konsep Kebijakan Publik milik James E. Anderson³³ dalam karyanya yang berjudul *Public Policy Making* menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang terjadi di negaranya. Konsep kebijakan publik ini juga berfokus pada tindakan yang nyata dilakukan oleh pemerintah dan bukan hanya berupa keputusan atau kehendak semata. Kebijakan publik merupakan seluruh tindakan yang secara sadar, terarah dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang memasukkan pihak serta aktor yang memiliki kepentingan dalam bidang tertentu yang tertuju untuk menggapai tujuan atau kepentingan nasional.

³³ James E. Anderson, 2014, *Public Policy Making*, Cengage Learning, Hal. 1

Kebijakan Publik dapat dianalisis dengan 4 poin menurut Anderson³⁴, yaitu

1. Kebijakan publik merupakan kebijakan atau peraturan yang dihasilkan dan dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Maksud dari poin ini adalah aktor-aktor negara dan non negara mampu untuk memberikan pengaruh dalam pengembangan kebijakan publik. Karakteristik khusus dari kebijakan publik merupakan berangkat dari formulasi kebijakan publik yang dibentuk oleh para pemimpin tertinggi sebuah negara seperti lembaga eksekutif, legislator, administrator, anggota dewan atau raja. Alasan ini karena mereka dianggap terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap urusan sehari-hari politik. Jika dikaitkan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi kasus femisida dengan mengeluarkan 2 kebijakan yaitu *Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024* dan *Programa Integral Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres PIPASEVM 2021-2024*. Dimana kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah Meksiko yang berkerja sama dengan Sekretariat Kementrian Dalam Negeri dan Administrasi Publik Federal (APF), pemerintahan negara bagian dan Instansi Perempuan

³⁴ Ibid Hal. 2-3

Nasional (INMUJERES). Dalam upaya pemerintah Meksiko untuk menurunkan angka femisida, implementasi kebijakan publik mencakup berbagai tindakan dan strategi yang dirancang oleh lembaga dan pejabat pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yang tercantum pada *Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024* dan *Programa Integral Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres PIPASEVM 2021-2024* seperti memberikan penegakan hukum dan melakukan peningkatan sistem peradilan serta menjalin kerjasama dengan lembaga non pemerintah yang mana akan berfokus pada hak perempuan untuk mendapatkan dukungan, pengetahuan, dan sumber daya tambahan.

2. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah seiring waktu yang diputuskan bersama. Kebijakan ini tidak hanya mencakup keputusan untuk mengadopsi suatu Undang-Undang atau membentuk peraturan baru terkait topik tujuan, namun juga untuk menegakkan dan melaksanakan poin dari Undang-Undang atau peraturan tersebut. Kaitannya adalah kebijakan *Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024* dan *Programa Integral Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres PIPASEVM 2021-2024* dimana 2 kebijakan tersebut tujuan dan prinsipnya selaras dengan (*Ley general Para La Igualdad Entre*

Mujeres Y Hombres) Undang-Undang Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-Laki dan juga terkandung dalam Rencana Pembangunan Nasional 2019-2024 yang dirancang oleh pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador yang sesuai dengan sistem hukum dalam perencanaan nasional.

3. Kebijakan Publik sebagai respon dan tindakan pemerintah dalam menanggapi tuntutan atau isu yang berkembang di masyarakat. Tuntutan ini dapat berupa dorongan masyarakat agar pemerintah melakukan sesuatu, dimana tuntutan ini hanya membutuhkan tindakan untuk mengatasi. Setelahnya pemerintah akan membuat keputusan seperti dengan membuat Undang-Undang, mengeluarkan program komprehensif, peraturan administratif atau membuat hukum berdasarkan Undang-Undang. Keputusan dan kebijakan merupakan bentuk ekspresi pemerintah secara formal seperti Undang-Undang Legislatif, perintah atau keputusan eksekutif, peraturan yang berlatar belakang Undang-Undang administratif, pendapat pengadilan, pernyataan dan pidato dari pejabat pemerintah yang menunjukkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan pemerintah termasuk proses untuk mewujudkan tindakan tersebut. Dalam penelitian ini maka diketahui pada tahun 2019 terjadi lonjakan kasus femisida yang menimbulkan banyak protes dan aksi demonstrasi dari para aktivis perempuan untuk memperjuangkan hak hidup

dan kebebasan perempuan. Oleh karena itu pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan di tahun 2020 yaitu *Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024* sebagai bentuk respon terhadap keinginan para perempuan Meksiko untuk menekan kasus kekerasan yang terjadi, lalu pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan kedua di tahun 2021 yaitu *Programa Integral Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres PIPASEVM 2021-2024* yaitu program komprehensif untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap korban dari kasus femisida.

4. Kebijakan publik merupakan tindakan nyata yang dilakukan dalam realitas kehidupan dan bukan kehendak semata. Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai kebijakan yang positif apabila kebijakan tersebut dapat menjangkau aspek tujuan dan mengatasi suatu masalah yang berkembang di negaranya, dan dikatakan sebagai kebijakan negative apabila pemerintah lebih memilih untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu guna merespon isu yang berkembang di negaranya. Jika dilihat dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko maka secara sekilas dapat dikatakan kebijakan yang dikeluarkan sebagai kebijakan publik dikarenakan pemerintah merespon desakkan yang diminta oleh masyarakat dan diketahui pada

tahun 2022 hingga 2023 kasus femisida di Meksiko mulai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis menggunakan deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah bentuk jenis yang menggunakan fenomologi sosial, yaitu untuk mengkaji secara mendalam serta menemukan pola³⁵ yang muncul terkait bagaimana sebuah fenomena atau peristiwa tersebut dapat terjadi .

1.6.2 Metode Analisis

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang menggunakan perilaku individu maupun kelompok serta fenomena baik fenomena sosial dan juga alamiah untuk mendapatkan pemahaman. Penelitian kualitatif menggunakan data deskriptif seperti dokumen, jurnal, artikel, hingga berita yang dapat diamati³⁶. Sebuah penelitian yang bersifat kualitatif menjelaskan terkait masalah yang belum jelas dan bertujuan untuk mengetahui makna tersembunyi, oleh karena itu mengembangkan teori untuk menghasilkan data yang sebenarnya. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara holistic-kontekstual

³⁵ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Desdkriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan," *Quanta* 4, no. 1 (2018): 44–51 hal.84, <http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1709>

³⁶ Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, ed. Jejak, 1st ed. (Sukabumi, 2017), hal.44.

dengan mengumpulkan data-data dari peneliti sebelumnya sebagai alat instrumen untuk melakukan penelitian³⁷.

1.6.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dalam proses mengumpulkan data pada penelitian ini merupakan studi dokumen (*dokumen research*). Sugiyono menjelaskan dokumen sebagai catatan yang berbentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental dari seseorang dari suatu fenomena yang telah terjadi³⁸. Peneliti menggunakan bahan-bahan referensi dari berbagai macam sumber seperti: artikel, jurnal ilmiah, majalah, buku, buku online, tulisan skripsi, berita, serta literatur lainnya yang memiliki korelasi terhadap tulisan ini. Seiring perkembangan zaman studi dokumen mulai banyak digunakan dalam penelitian kualitatif sebab tingkat kredibilitas dari hasil penelitian kualitatif banyak ditentukan oleh penggunaan serta pemanfaatan dokumen yang ada

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Materi

Penulis memberikan batas untuk penjelasan penelitian ditujukan agar pembahasan tidak terlalu melebar, terbatas pada upaya pemerintah Meksiko dalam kebijakan *Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024* dan *Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2021-2024* selama masa

³⁷ M.Pd.I Dr. M.Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra, Penelitian Kualitatif, ed. SE Nurlaeli (Lombok: Holistica, 2020) hal.6

³⁸ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–181.

kepemimpinan Andrés Manuel López Obrador dalam menanggulangi kasus femisida yang terjadi.

b. Batasan Waktu

Batasan waktu penelitian ini penulis tentukan selama Meksiko berada dibawah kepemimpinan Andrés Manuel López Obrador yaitu pada tahun 2018-2023 dan diketahui pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus secara drastis dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pergantian kepemimpinan, dimana pada masa presiden sebelumnya arah kebijakannya fokus untuk memberantas kartel narkoba yang menjadi salah satu alasan tingginya kasus femisida. Dan pada tahun 2022 jumlah kasus femisida mulai menurun hingga pada tahun 2023.

1.7 Argumen Pokok

Di Meksiko kasus femisida sangat tinggi, hal ini dikarenakan mendominasinya kartel narkoba di wilayah Meksiko yang menimbulkan tingginya kasus kriminalitas salah satunya adalah kasus femisida. Femisida merupakan bentuk dari adanya ketidaksetaraan gender yang kuat di Meksiko. Sehingga upaya pemerintah Meksiko dalam menanggulangi kasus femisida yang terjadi pada tahun 2018-2023 pada masa kepemimpinan Andres Manuel Lopez Obrador dengan mengeluarkan 2 kebijakan publik. Dengan kebijakan yang disahkan pada tahun 2020 adalah *Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres* 2020-2024 yang fokus untuk meningkatkan kesetaraan gender di Meksiko dan meningkatkan peran perempuan dengan melakukan pemberdayaan dan program pelatihan. Lalu kebijakan yang kedua adalah *Programa Integral Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres PIPASEVM*

2021-2024 yang berfokus untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya kasus femisida.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 2. Sistematika Penulisan

BAB	Bahasan Pokok
BAB I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Konsep Kebijakan Publik 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II Sejarah dan Faktor Pendorong Terjadinya Kasus Femisida di Meksiko	2.1 Femisida di Meksiko 2.1.1 Kategori Kasus Femisida 2.1.2 Jumlah Kasus Femisida di Meksiko 2.2 Faktor Pendorong Terjadinya Femisida Di Meksiko 2.2.1 Kartel Narkoba 2.2.1 Budaya Machismo 2.3 Landasan Kebijakan Pro-Perempuan yang anti-femisida 2.4 Kebijakan Presiden Sebelumnya dalam menangani kasus femisida
BAB III Upaya Pemerintah Meksiko dalam Menanggulangi Kasus Femisida Pada Masa Kepemimpinan	3.1 <i>Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024</i> 3.1.1 Tujuan Prioritas 3.1.2 Tindakan Pemerintah 3.2 <i>Programa Integral Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres PIPASEVM 2021-2024</i> 3.2.1 Tujuan Prioritas

Andres Manuel Lopez Obrador	3.2.2 Tindakan Pemerintah 3.3 Dampak Kebijakan Bagi Penurunan Kasus Femisida
BAB IV Penutup	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

